

MENKEU BELUM REVISI ASUMSI APBN

BKF: Inflasi 2011 Bakal Lebih Tinggi

Oleh Grace Dwitya Amianti

► JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memproyeksikan, tekanan inflasi tahun ini bakal lebih tinggi dibanding tahun lalu. Hal itu terjadi karena didorong oleh beberapa faktor domestik maupun internasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKF Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, faktor domestik tersebut berasal dari perubahan harga-harga yang diatur pemerintah (*administered prices*). Sebagai contoh, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pelepasan *capping* subsidi listrik bagi industri, kenaikan harga pembelian pemerintah (untuk beras), dan harga eceran pupuk. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari kenaikan harga minyak global.

"Harga minyak dunia masih akan naik tahun ini, sehingga bisa menyumbang tekanan inflasi. Kalau harga minyak dunia naik 10% dari asumsi APBN, inflasi bisa naik sekitar 0,08%. Sedangkan, jika naik 20%, inflasi bisa menjadi 0,15%," kata Bambang dalam seminar yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar tentang inflasi di Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (27/1).

Bambang menambahkan, inflasi akibat pembatasan BBM bersubsidi bisa mencapai sekitar 0,5-0,87%. Namun, kata dia, hal itu berdasarkan asumsi sebanyak 50% penggunaan premium kendaraan dialihkan ke BBM nonsubsidi.

Di sisi kelistrikan, jika *capping* subsidi dilepas dan tarif naik 18-31%, inflasi akan terpengaruh sekitar 0,3-0,46%. "Jadi total tambahan inflasi akan berada di sekitar 0,8-1,32%," ujar Bambang.

Kenaikan tekanan inflasi karena *administered prices* tersebut dinilai bisa mencapai sekitar 6,1-6,6%. Dia berharap, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih tinggi daripada inflasi.

Sedangkan jika mengacu pada harga

minyak dunia, kenaikan rata-rata setahun 10% di atas asumsi ICP sebesar US\$ 80 per barel, inflasi dinilainya akan naik sekitar 0,08%. Jika 20% di atas asumsi ICP, pengaruhnya terhadap tekanan inflasi sekitar 0,15%.

Kenaikan harga minyak 10% juga mendorong harga tepung terigu dan produk turunannya naik 0,09%. Komoditas lainnya seperti kedelai juga akan naik 0,0001% dan minyak goreng 0,46%.

"Kemungkinan harga minyak dunia tahun ini sekitar US\$ 93 per barel, itu berarti meningkat sekitar 10-20%. Jadi pertambahan inflasinya mungkin sebesar 0,1%," jelas Bambang.

Namun, kata dia, perhitungan itu belum termasuk kenaikan harga pangan dan kemampuan produksi serta impor. Sebab itu, dia menilai, pemerintah perlu kebijakan fiskal yang bisa mendukung subsidi harga.

Secara umum, kondisi tahun ini dinilai lebih kompleks karena adanya lonjakan penduduk, pengembangan *bio fuels*, dan iklim ekstrim. "Tapi kita harus lakukan mitigasi untuk stabilitas harga pangan, meminimalkan dampak *administered prices*, dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah (Pemda)," jelas Bambang.

Di tempat yang sama, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi A Sarwono mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar sebenarnya dapat membantu menekan inflasi. Namun, BI akan tetap membatasi penguatan nilai tukar guna menghindari serbuan barang impor di pasar domestik.

"Kami tetap punya *concern* untuk menjaga inflasi. Dalam hitungan kami, batas bawah

rupiah sebesar Rp 9.000 per dolar akan menurunkan inflasi, namun kami tetap membatasi penurunannya," kata Hartadi kemarin.

Hartadi menuturkan, pihaknya membuka ruang untuk penguatan rupiah agar inflasi terjaga, tapi tidak terlalu lebar. Namun, Indonesia tidak akan kehilangan daya saing kendati rupiah menguat, selama penguatannya sama dengan yang terjadi di negara tetangga.

Menurut Hartadi, pihaknya juga didesak oleh berbagai kalangan untuk menaikkan suku bunga acuan (*BI rate*) menyusul tingginya tekanan inflasi. Terkait desakan itu, kata dia, kebijakan menaikkan *BI rate* adalah langkah terakhir yang bakal diambil bank sentral. Dia juga meyakinkan bahwa kenaikan *BI rate* bukanlah 'obat' untuk mengatasi inflasi.

"Ketika *BI rate* dinaikkan arus modal masuk semakin deras, sehingga eksese likuiditas makin tinggi. Ketika likuiditas makin berlebih, inflasi akan kembali naik. Langkah menaikkan *BI rate* dipilih ketika tidak ada cara lain," papar dia.

Belum Akan Direvisi

Sementara itu, dari Davos dilaporkan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah belum memikirkan untuk merevisi asumsi harga minyak dan inflasi dalam APBN 2011. Saat ini, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan harga pangan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi.

"Kami memerhatikan itu, tetapi tidak merevisi begitu ada perubahan. Kami akan mengikuti perkembangan yang ada dan mengevaluasinya. Kalau dirasakan perlu baru akan dilakukan revisi," kata Agus Martowardojo di sela penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEC) di Davos, Swiss, Kamis (27/1), seperti dilaporkan wartawan *Investor Daily* Novy Lumanauw yang ikut serta bersama rombongan Presiden RI.

Menurut Menkeu, evaluasi kedua asumsi itu baru akan dilakukan pada akhir semester I-2011. Namun, tidak tertutup dilakukan evaluasi lebih cepat jika terjadi perkembangan yang dramatis.